

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan peluang usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang. EMKM dalam SAK EMKM (2018) adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam SAK ETAP, yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Usaha mikro berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2.1.1 Kriteria UMKM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, dijelaskan kriteria yang tepat mengenai UMKM, yaitu:

1. Kriteria Usaha Mikro
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.

2. Kriteria Usaha Kecil

a. Memiliki kekayaan bersih antara Rp. 50.000.000 dan Rp. 500.000.000

b. Memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp. 300.000.000 dan Rp. 2.500.000.000.

3. Kriteria Usaha Menengah

a. Memiliki kekayaan bersih antara Rp. 500.000.000 dan Rp. 10.000.000.000.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan antara Rp. 2.500.000.000 dan Rp. 50.000.000.000

Di sisi lain, kriteria UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang dibagi menjadi modal usaha atau hasil penjualan tahunan, dimana modal usaha tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (Prasetya, 2023), sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Kriteria UMKM

Kategori	Modal Usaha	Hasil Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	s.d. Rp. 1.000.000.000	s.d. Rp. 2.000.000.000
Usaha Kecil	Lebih dari Rp. 1.000.000.000 s.d. Rp. 5.000.000.000	Lebih dari Rp. 2.000.000.000 s.d. Rp. 15.000.000.000
Usaha Menengah	Lebih dari Rp. 5.000.000.000 s.d. Rp. 10.000.000.000	Lebih dari Rp. 15.000.000.000 s.d. Rp. 50.000.000.000

Sumber: Prasetya (2023)

Nominal kriteria-kriteria UMKM di atas, dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan pemerintah.

2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK-EMKM)

Standar Akuntansi Keuangan merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. IAI telah menerbitkan SAK EMKM yang disahkan oleh DSAK pada tanggal 18 Mei 2016. SAK EMKM berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai tanggal 1 Januari 2018.

SAK EMKM disusun untuk meningkatkan penegasan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. Penerbitan SAK EMKM adalah bentuk dukungan IAI sebagai organisasi profesi akuntansi dalam meningkatkan penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas.

SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dari SAK ETAP karena mengatur transaksi yang dilakukan oleh EMKM dengan pengukuran yang murni menggunakan biaya historis. Berdasarkan ruang lingkup SAK EMKM maka standar ini dimaksudkan untuk:

1. SAK EMKM dimaksudkan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah.
2. SAK EMKM dapat digunakan untuk entitas yang tidak memenuhi kriteria Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Tujuan dari laporan keuangan SAK EMKM ini adalah:

1. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan bagi sejumlah besar pengguna
2. Pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.3 Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang menyajikan informasi keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini dapat memenuhi kebutuhan umum para pemakainya. Laporan keuangan harus disajikan dengan prosedur-prosedur tertentu berdasarkan aturan yang berlaku (Kartikahadi et al., 2016). Laporan keuangan disusun untuk jangka waktu tertentu (periode pelaporan).

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (Warsadi et al., 2017). Berdasarkan pendapat warsadi atas laporan keuangan, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan UMKM adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan atas entitas mikro, kecil, dan menengah.

2.3.1 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut SAK EMKM (2018), tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. Laporan ini juga bertujuan untuk

memberi kemudahan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditur maupun investor.

2.3.2 Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Berdasarkan SAK EMKM (2018), asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan di antaranya adalah:

a. Dasar Akrua

Entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing pos tersebut.

b. Kelangsungan Usaha

Pada saat menyusun laporan keuangan. Manajemen menggunakan SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha di masa depan (kelangsungan usaha). Entitas memiliki kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut dan menghentikan operasi atau tidak memiliki alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Jika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta mengapa entitas tidak memiliki kelangsungan usaha.

c. Konsep Entitas Bisnis

Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis. Entitas bisnis, baik perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, maupun

badan usaha yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya. transaksi yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus dapat dipisahkan dari transaksi pemilik bisnis tersebut, maupun dari transaksi entitas lainnya.

2.3.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM

Menurut SAK EMKM (2018), komponen laporan keuangan minimum terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode

Laporan keuangan ini menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada setiap akhir periode pelaporan. Pos-pos yang mencakup laporan keuangan ini, di antaranya adalah kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas. SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap akun-akun dalam penyajiannya. Meskipun demikian, penyajian pos-pos aset entitas diurutkan berdasarkan likuiditas dan pos-pos liabilitas berurutan berdasarkan jatuh tempo.

2. Laporan laba rugi selama periode

Menurut SAK EMKM (2018), laporan laba rugi merupakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Laporan laba rugi berisi informasi kinerja keuangan entitas yang terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan. Pos-pos yang termasuk dalam laporan laba rugi adalah pendapatan, beban keuangan, beban pajak, pendapatan dan beban lainnya.

3. Catatan atas laporan keuangan (CALK)

Menurut SAK EMKM (2018), catatan atas laporan keuangan berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. Catatan atas laporan keuangan ini memuat, di antaranya adalah

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi
- c. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material, sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan (Ningtiyas, 2017).

2.3.4 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

Menurut SAK EMKM (2018), pengakuan unsur laporan keuangan adalah proses pembentukan suatu pos dalam laporan keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomik yang terkait dengan pos-pos aset, liabilitas, penghasilan dan beban dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat pada aliran manfaat ekonomik masa depan dilakukan atas bukti yang terkait dengan kondisi yang tersedia pada akhir periode pelaporan.
2. Pos-pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dan andal. Pada kasus lain, biaya harus bisa diestimasi.

Pengakuan-pengakuan dalam laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM adalah sebagai berikut:

a. Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomik di masa depan, serta diharapkan akan diperoleh entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan, apabila manfaat ekonomiknya dipandang tidak memungkinkan mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran terjadi. Sebagai alternatifnya, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

b. Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. Menurut SAK EMKM (2018), liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan, apabila pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomik dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

c. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

Informasi kinerja entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan dan disajikan dalam laporan laba rugi.

a. Penghasilan (*income*)

Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Menurut SAK EMKM (2018), penghasilan diakui dalam laporan laba rugi, apabila kenaikan manfaat ekonomik di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Penghasilan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal. Penghasilan ini dikenal dengan sebutan penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa.

b. Beban (*expenses*)

Beban adalah penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal. Menurut SAK EMKM (2018), beban diakui dalam laporan laba rugi, apabila penurunan manfaat ekonomik di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

2.3.5 Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis ini terdiri dari dua hal, di antaranya adalah:

1. Biaya historis aset

Biaya historis aset sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

2. Biaya historis liabilitas

Biaya historis liabilitas adalah sejumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

2.3.6 Penyajian Laporan Keuangan

Menurut SAK EMKM (2018), entitas menyajikan laporan keuangan secara jujur. Selain itu, entitas juga menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada setiap akhir periode pelaporan. Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai. Hal yang tidak memadai bagi pemakai ini untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain atas posisi kinerja keuangan entitas.

Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi yang relevan, representatif tepat, keterbandingan, dan keterpahaman (IAI, 2018).

1. Relevan artinya informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.

2. Representasi tepat artinya informasi dalam laporan keuangan mempresentasikan secara tepat apa yang akan dipresentasikan dan bebas dari kesalahan material dan bias.
3. Keterbandingan artinya informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.
4. Keterpahaman artinya informasi disajikan agar mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna ini diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai dan kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

2.4 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi menurut Romney & Steinbart (2018: 10) merupakan sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Menurut Turner et al. (2017), sistem informasi akuntansi meliputi proses, prosedur, dan sistem untuk mendapatkan data akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi ke dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi secara terperinci dengan mengklasifikasikan, merangkum, mengkonsolidasikan, dan melaporkan data akuntansi yang diringkas kepada pengguna internal maupun eksternal. Sistem informasi akuntansi diartikan sebagai suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisis, dan mengomunikasikan informasi keuangan yang relevan (Zamzami et al., 2021). Sistem informasi

akuntansi ini dapat disimpulkan sebagai sistem yang dapat menghasilkan informasi dengan melakukan kegiatan mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memproses data, sampai dengan menghasilkan laporan data akuntansi yang digunakan untuk pengambilan keputusan, baik pengguna internal maupun eksternal.

2.4.1 Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart (2018), ada enam komponen sistem informasi akuntansi, di antaranya adalah:

1. Para pengguna yang menggunakan sistem.
2. Prosedur atau instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.
3. Data yang berisikan tentang organisasi dan kegiatan bisnis.
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data.
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, perangkat periferal, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam mengolah sistem informasi akuntansi.
6. Pengendalian internal dan prosedur keamanan guna melindungi sistem informasi akuntansi.

2.4.2 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart (2018), ada tiga fungsi bisnis dalam sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan keenam komponen di atas, yaitu:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan yang dilakukan organisasi, sumber daya, dan personal dari organisasi.
2. Mengubah data menjadi informasi yang digunakan manajemen dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi kegiatan, sumber daya, dan personal organisasi.
3. Memberikan pengendalian yang memadai untuk melindungi aset dan data organisasi.

2.4.3 Manfaat Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi dapat memberikan manfaat dan menambah nilai untuk organisasi dengan:

1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya dari produk atau layanan jasa
 2. Berbagi pengetahuan
 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya (*supply chains*)
 4. Memperbaiki struktur pengendalian internal
 5. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk pengambilan keputusan
- (Romney & Steinbart, 2018).